

**PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM  
OPERASI PT. EKA MINERAL INDONESIA (EMI) DI  
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

*Oleh:*

**Trisha Zaliani Fitri**

**2010832001**



**Pembimbing:**

**Drs. Thamrin, M.Si**

**Dewi Anggraini, S.IP., M.Si**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

## ABSTRAK

Persoalan lingkungan hidup semakin masif terjadi saat ini dan menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan karena menyangkut kelangsungan makhluk hidup. Hal tersebut berkaitan dengan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam memperhatikan ekologi politik. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang memiliki dampak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam operasi PT. EMI di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan menggunakan konsep proses pengawasan oleh Griffin. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, standar yang digunakan dalam permasalahan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, pengukuran kinerja oleh Pemerintah Kota Padang dilakukan dengan mengunjungi lokasi *stockpile* dan lokasi terdampak sebanyak dua kali dengan menemui berbagai fakta dan rekomendasi yang diberikan sebagai mediasi. Ketiga, perbandingan kinerja dengan standar yang menyatakan bahwa PT. EMI tidak memiliki izin terkait penumpukan batubara pada lokasi *stockpile* tersebut dan terkait dampak lingkungan memang nyata adanya tetapi penilaian kurang efektif dikarenakan tidak dilakukannya uji laboratorium oleh Pemerintah Kota Padang secara valid. Keempat, terlepas dari hasil perbandingan tersebut Pemerintah Kota Padang mengambil keputusan untuk memberikan tindakan korektif pada pihak perusahaan sebagai sanksi administratif berupa penyegalan dan penutupan kegiatan. Namun, penutupan kegiatan pada lokasi *stockpile* tersebut kurang efektif ditandai dengan tetap beraktivitasnya perusahaan tersebut dan sanksi yang diberikan tidak ditaati sesuai waktu yang ditetapkan.

**Kata Kunci:** Kerusakan Lingkungan, Pengawasan, PT. EMI

## **ABSTRACT**

*Environmental issues are increasingly massive today and have become a crucial issue that needs attention because it concerns the survival of living things. This is related to the local government's lack of seriousness in paying attention to political ecology. Based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is explained that local governments have the authority to supervise activities that have environmental impacts. This research aims to explain and analyze the supervision carried out by the Padang City Government in the operation of PT EMI in Lubuk Begalung District, Padang City. This research uses a qualitative approach with a case study and uses the concept of supervision process by Griffin. The results of this study are first, the standards used in this problem are Law Number 32 of 2009 and Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. Second, performance measurement by the Padang City Government is carried out by visiting the stockpile site and affected locations twice by meeting various facts and recommendations given as mediation. Third, the comparison of performance with the standard which states that PT EMI does not have a permit related to the stacking of coal at the stockpile location and related environmental impacts is real but the assessment is less effective because the Padang City Government did not conduct valid laboratory tests. Fourth, regardless of the results of the comparison, the Padang City Government made a decision to provide corrective action to the company as an administrative sanction in the form of sealing and closing activities. However, the closure of activities at the stockpile location was not effective as the company continued its activities and the sanctions given were not adhered to within the stipulated time.*

**Keywords: Environmental Damage, Supervision, PT. EMI**